

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lahirnya praktek public relation di berbagai organisasi di masyarakat umum dipengaruhi oleh unsur-unsur perubahan sosial-kultur di masyarakat umum yang bersangkutan. Pada akhirnya, dapat pula dikatakan bahwa kemajuan dalam kehidupan sosial-sosial masyarakat umum merupakan salah satu kunci pengenalan lahirnya praktek public relations. Aktivitas Hubungan Masyarakat (PR) cukup banyak dilakukan oleh masyarakat sehingga seolah-olah hadir secara konsisten sepanjang kehidupan sehari-hari (Dilenschneider dan Bartiromo, 2010; Kriyantono dan McKenna, 2017). Sifat selalu hadir inilah yang disebut Horsley (2009) sebagai "*ubiquitous nature of public relations*". Prinsip-prinsip public relations telah diketahui, dipertimbangkan, dan dilatih untuk waktu yang cukup lama" (Leahigh, 1993).

Fungsi peranan humas di lingkungan pemerintahan sangatlah penting agar dapat membangun citra positif bagi bangsa dan negara. Upaya dalam revitalisasi peranan kehumasan berikut menjadi tuntutan yang mendesak, wajib untuk dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah, sebagai momentum strategis dalam perubahan tatanan peranan kehumasan yang bersinergi secara efektif. (Kasmirus, 2013). Hal ini didukung oleh penelitian (Henny 2014) Dengan keefektivan budaya kerja dalam peranan kehumasan demi mengembalikan kepercayaan serta citra pemerintahan yang memudar kepada pemerintah dengan cara mengeluarkan suatu *press release* dan *advertorial yang transparansi*.

Berdasarkan penelitian Ferrari (2009) tentang pelaksanaan budaya hubungan masyarakat di Amerika Selatan, dimana kurangnya legitimasi profesi di sub-benua tetapi di saat yang sama berpendapat bahwa sebagian besar profesional memegang "sebagai kebenaran universal bahwa publik" hubungan adalah peran manajerial, strategis dan fokus teknis atau taktis tidak sesuai". Demikian pula, pandangan ini mengarah ke banyak contoh hubungan masyarakat di Asia-Pasifik yang disalah artikan sebagai anomali, kontradiksi atau penundaan (Halff & Gregory, 2014), terutama ketika hubungan masyarakat lebih bersifat pemerintah daripada berpusat pada perusahaan. Adapun praktek kehumasan di Mexico Amerika Utara, teori normatif di Meksiko

disediakan oleh publikasi asing yang tidak sesuai dengan konteks politik, sosial, atau budaya (Ferrari, 2009). Hasilnya adalah, sebagai disiplin komunikasi, praktek public relations memiliki pengaruh yang relative terhadap peranan praktisi kehumasan, terutama di bidang jurnalisme. (Chen & Culbertson, 2009).

Namun pada pelaksanaannya, berdasarkan penelitian Long (2004) budaya praktisi kehumasan di Mexico sering dikaitkan dengan tugas sebagai pengirim hadiah, menjadwalkan acara khusus serta membina hubungan pribadi. Konsep *guanxi*, karakteristik budaya Tiongkok yang unik, adalah salah satunya dimensi budaya yang dibahas secara luas (Chen, 1996, Kipnis, 1997, Tan, 2000, Huang, 2001, Aw, Tan, dan Tan, 2002, Hung, 2003.). Budaya *Guanxi* tampaknya adalah manifestasi Cina dari model pengaruh pribadi hubungan masyarakat. Seperti model pengaruh pribadi, *guanxi* melibatkan membangun hubungan interpersonal dengan individu strategis seperti: wartawan dan pejabat pemerintah sering dengan melakukan kebaikan untuk mereka. Hubungan seperti itu membangun membantu membuka “gerbang” sehingga ketika dibutuhkan individu-individu tersebut dapat diandalkan untuk membalas budi baik itu dengan menerbitkan berita atau menyetujui pemerintah lisensi.

Terlepas dari efektivitas peranan humas, adapun menurut penelitian (Sriramesh, 2020) Praktek kehumasan di Kuwait menjelaskan bahwa industri hubungan masyarakat saat ini di Kuwait terutama yang berkaitan untuk hubungan masyarakat strategis, praktek kehumasan sangat penting karna dapat membantu strategi serta efektivitas dalam organisasi. Namun demikian salah satu penyebab tidak optimalnya praktek kehumasan dalam organisasi adalah kurangnya dukungan serta apresiasi yang di dapatkan oleh praktisi kehumasan. Praktek kehumasan di Kuwait mengalami penurunan reputasi termasuk asumsi bahwa praktisi kehumasan tanpa pengetahuan dan pengalaman yang relevan dapat menyebabkan penurunan efisiensi pelaksanaan fungsi kehumasan. Hal ini didukung oleh penelitian (Lim, et. al. 2005) bahwa pelaksanaan peran public relation di Singapura terus mengalami penurunan, dikarenakan kurangnya kemampuan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap praktisi PR sehingga adanya dorongan dari pihak manajemen yang mendesak untuk memberikan arahan berupa pelatihan dan peningkatan pengetahuan praktisi kehumasan.

Di Jepang sendiri terdapat budaya yang signifikan terhadap praktik kehumasan. Hubungan atasan dan bawahan di pengaruhi oleh konsep dimana atasan berusaha

memenuhi kebutuhan bawahan, begitu pula sebaliknya. Hal ini menyatakan bahwa kontribusi budaya perusahaan yang kuat secara langsung mempengaruhi organisasi komunikasi internal dan eksternal. Hal ini juga ditemukannya bahwa kepribadian public dan perilaku individu merupakan peran penting dalam pelaksanaan budaya komunikasi. (Sriramesh dan Takasaki, 2010).

Berdasarkan penelitian Rhee ([2002](#)) menyelidiki praktik hubungan masyarakat di Korea yang terkait dengan dimensi budaya menurut teori Hofstede menyimpulkan, secara keseluruhan, budaya ditemukan terkait dengan praktik hubungan masyarakat dan keunggulan dalam hubungan masyarakat. Kecuali untuk dimensi maskulinitas, semua dimensi budaya memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan keunggulan indeks'. Penelitian tersebut menunjukkan kemungkinan bahwa dimensi budaya dapat menjelaskan praktik hubungan masyarakat di Korea mengenali perbedaan individu perusahaan dan persepsi tanggung jawab di kalangan praktisi hubungan masyarakat di Korea.

Adapun pelaksanaan praktek kehumasan di Indonesia menurut (Gusti, 2017) Praktek PR sudah dimulai sejak Indonesia proklamasi. Perubahan dalam strategi ekonomi serta sosial yang akhirnya menaungi kemajuan praktek humas di Indonesia belum lama ini. Meskipun praktek humas umumnya cukup lama dan hamper sama peaksanaannya dengan negara lain, profesionalisme masih menjadi permasalahan yang cukupberakhir terhadap perkembangan praktek kehumasan. Hal tersebut disebabkan kurangnya pelaksanaan dan fungsi humas yang sesungguhnya. Di suatu organiasi, praktisi humas hanya menjadi pekerja teknis yang tidak ikut menentukan kemana arah tujuan suatu perusahaan. Hal tersebut menjadi budaya dalam praktis kehumasan dimana masalha profesionalisme masih menjadi konsekuensi logis dari kurangnya pendidikan yang cukup memadai bagi praktisi humas.

Akan tetapi di sisi lain, pelaksaannya budaya Public Relation banyak pihak yang setuju dan sepakat bahwa Public Relations mempunyai tugas serta peran fungsi yang penting dalam organisasi. Berdasarkan pelaksanaannya bahwasanya pelaksanaan budaya Public relation sangatlah penting, hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian yang di lakukan di beberapa negara seperti Amerika Selatan, Mexico, Cina , Kuwait, Korea dan Indonesia.

Sekretariat DPRD merupakan suatu instrument dari suatu kelembagaan yang sangat penting bagi DPRD agar dapat melaksanakan semua fungsi dan tugasnya secara efisien dan efektif. Sekretariat DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas memberikan pelayanan untuk kelancaran kegiatan DPRD, mempersiapkan persidangan, menyiapkan produk perundangundangan, kegiatan kehumasan, pelayanan umum dan kelancaran kegiatan DPRD dan melaksanakan kegiatan DPRD memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD. Peran humas di sekretariat DPRD memiliki peran penting untuk menjembati tugas dan fungsi dalam praktek kehumasan. Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun Skripsi ini dengan judul “PRAKTEK KEHUMASAN PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH: PERSPEKTIF BUDAYA SOCIETAL PROVINSI SUMATERA SELATAN”.

1.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada pelaksanaan Public Relation pada pemerintahan di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Sumatera Selatan, tidak pelaksanaan Public Relation dalam sector swasta. Hal tersebut dikarenakan Public relation Daerah, memiliki urgensi penting untuk menginformasikan terkait pelaksanaan praktek kehumasan sesuai undang-undang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti memberikan rumusan masalah, bagaimana praktek kehumasan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: perspektif budaya societal provinsi Sumatera Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui praktek kehumasan pada dewan perwakilan rakyat daerah: perspektif budaya societal provinsi sumatera selatan menurut teori *excellence model of public relations* dan teori dimensi budaya Hofstede ialah mengenai *power distance*, *uncertainty avoidance*, *masculinity-femininity*, dan *individualism – collectivism* dan *societal culture* dalam praktek kehumasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini secara akademis dapat memberikan kontribusi dalam keilmuan khususnya *Public Relations* karena berkaitan dengan praktek dalam kehumasan dan protokoler

1.5.2 Kegunaan secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi ilmu yang berguna dan juga sebagai rujukan dalam membuat penelitian serta menjadi acuan untuk kedepannya dapat dikembangkan pada instansi pemerintah maupun non pemerintah.

1.6 Waktu dan Periode Penelitian Proposal Skripsi

Tabel 1.1 Rincian Waktu dan Periode Penelitian

No	Tahapan	Waktu / Bulan											
		Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agus 2021	Sept 2021	Okt 2021	Des 2021	
1	Persiapan mencari informasi awal, judul dan topik penelitian												
2	Proses Penyusunan BAB 1, BAB 2, BAB 3												
3	Desk Evaluation												
4	Revisi												
5	Penelitian dan Pengumpulan data wawancara												
6	Pengelolaan data BAB IV dan V												
7	Pendaftaran Sidang Skripsi												
8	Sidang Skripsi												

Sumber : Olahan Peneliti 2021